

PERANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI JAWA TIMUR (Studi Pada Setiap Daerah Tingkat II di Jawa Timur)

A. Waluya Jati¹

ABSTRAK

Objective of this research is to investigate contribution of local tax and local fees (pajak dan retribusi daerah) comparison in five areas in east java province. This research is continues the previous research by LPEM-UI and Clean Urban Project (RTI) in 2000 about Contribution of domestics incomes to municipal budget in Indonesia.

Population of this research is all of municipal and regency in east java. We use multiple stage of sample selection *first* area sampling based on the east java government policy and *second* with random sampling. The research use *time series data* during 5 years since 1998 to 2002. Descriptive statistics with the simple tabulation method and inferential statistics based on *one way ANOVA* method that are used in this research.

Result of descriptive statistics show that average of local tax and local fees contribution is over the 70% in each municipal/regency in east java. Then, result of inferential statistics by *one way ANOVA* method show there isn't significant different among the five sample group. It's means that all of the municipal/regency in east java rely on local tax and local fees as the main/dominant resource to municipal/regency budget. Municipal/regency government tend to abuse the other income resources for domestics incomes.

1. PENDAHULUAN

Peran strategis pajak dan retribusi daerah memang telah memberikan kontribusi signifikan dalam sumber penerimaan PAD. Akan tetapi, perannya belum cukup kuat dalam menyokong APBD secara keseluruhan. Studi yang dilakukan oleh LPEM-UI bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI (2000), menunjukkan walaupun pajak dan retribusi daerah menjadi pos dominan dalam PAD, tetapi sumbangan PAD terhadap APBD sangatlah kecil. Penelitian ini sekaligus membuktikan bahwa kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan dengan PAD nya sulit dilakukan. Dengan kata lain transfer dana dari pusat (DAU, bagi hasil pajak, dan dana lain dalam pelaksanaan dekonsentrasi dan pembantuan) masih menjadi penerimaan dominan dalam pembiayaan daerah.

Tidak signifikannya peran pajak daerah dalam APBD karena *sistem tax assignment* di Indonesia masih banyak pajak potensial yang dikuasai Pemerintah

Pusat. Beberapa pajak potensial tersebut adalah pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan bea masuk. Kenyataan selama ini menunjukkan bahwa distribusi kewenangan perpajakan antara daerah dan pusat sangat timpang, yaitu jumlah penerimaan pajak yang dipungut oleh daerah hanya sebesar 3,45% (Sidik, 2002) dari total penerimaan pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah) Ketimpangan dalam penguasaan sumber-sumber penerimaan pajak tersebut memberikan petunjuk bahwa perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia dari sisi *revenue assignment* masih terlalu "*sentralistis*".

Kontribusi pajak dan retribusi daerah yang signifikan terhadap PAD juga terjadi di hampir semua kota dan kabupaten di Jawa Timur. Kelima wilayah di Jawa Timur menunjukkan bahwa kontribusinya diatas 60%. Pos-pos penerimaan yang lain seperti laba BUMD dan pos penerimaan lain yang syah sumbangannya tidak lebih dari 40%. Bahkan di kabupaten/kota tertentu kontribusi pajak dan retribusi daerah hampir mencapai 90%. Terdapat alasan kuat

¹ Waluya Jati. Jurusan Akutansi. Fakultas Ekonomi. Universitas Muhammadiyah Malang
Alamat Korespondensi : Jl. Hasanudin 575 RT.1/7 Junrejo Malang
Tlp. 0341-463474/0341-7337435, Hp. 081334043880

memang, bahwa pajak dan retribusi yang signifikan merupakan jaminan kelangsungan pembiayaan pembangunan karena sumber tersebut relatif aman dan stabil sepanjang tahun. Namun demikian kebijakan pusat yang distortif dalam *tax system* justru menjadikan ironi terhadap kebijakan ini.

Distorsi sistem tersebut terdapat dalam 2 kebijakan yaitu sistem pola bagi hasil pajak yang memberikan porsi kecil kepada daerah dan penguasaan sumber-sumber pajak potensial oleh pusat. Porsi kecil nampak dari prosentase bagi hasil pajak untuk daerah yang rasionya tidak lebih dari 50%, sedangkan penguasaan obyek pajak potensial oleh pusat misalnya dalam pajak penghasilan dan PBB. Kebijakan tersebut berdampak sulitnya bagi daerah untuk mencapai kemandirian dalam pembiayaan pembangunan. Sehingga tidak heran jika pemerintah daerah beramai-ramai menggenjot PAD dengan kebijakan ekstensifikasi obyek dan tarif pajak daerah, yang seringkali justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan daerah.

Berdasarkan pemikiran diatas, penelitian ini mengeksplorasi bagaimana kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Hasil eksplorasi tersebut kemudian akan dilakukan pengujian apakah terdapat perbedaan peranan (kontribusi) pajak dan retribusi daerah yang signifikan diantara kabupaten/kota di Jawa Timur. Hal ini bertujuan untuk menguji dan membuktikan apakah pemda di Jawa Timur cukup mengandalkan pajak dan retribusi daerah dalam struktur PAD. Oleh karena itu penelitian ini mengambil judul **“Peranan Pajak Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Jawa Timur”**.

2. METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data menggunakan metode *content analysis* atas dokumentasi realisasi APBD setiap daerah yang didokumentasikan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJPKPD). Metode ini digunakan karena data yang digunakan adalah data historis sekunder.

Data penelitian ini berupa data *time series* selama 5 tahun dari tahun 1998 sampai dengan 2002 berbentuk laporan realisasi APBD beberapa kabupaten/kota di Jawa Timur. Penggunaan data *time series* ini dimaksudkan agar (1) tidak terjadi bias data

yang terjadi jika hanya mengambil 1 atau 2 tahun. (2) mengurangi bias pasca pemberlakuan otonomi daerah. Dengan demikian dapat mengetahui secara obyektif kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah cenderung signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karakteristik data tersebut berakibat pengolahan datanya menggunakan data panel.

Metode pengambilan sampel dilakukan dengan 2 tahap, yaitu (1) dengan metode *area sampling* berdasarkan pembagian wilayah kabupaten/kota yang dilakukan pemerintah Jawa Timur (www.jatimonline.go.id) berdasarkan kondisi geografisnya. Topografis, demografis, dan kondisi lain yang relevan. Berdasarkan pembagian ini wilayah Jawa Timur dibagi menjadi 5 daerah yaitu Wilayah Barat, Wilayah Utara, Wilayah Tengah, Wilayah Selatan, dan wilayah Timur (2) dengan menggunakan metode *random sampling* untuk memilih sampel, dimana setiap daerah mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Penentuan secara random ini karena setelah dikelompokkan menurut area tertentu, maka seluruh kabupaten/kota dalam setiap wilayah mempunyai karakteristik yang relatif homogen.

Definisi operasional penelitian ini mengacu kepada pasal 4 UU no 22 tahun 1999, yang menyatakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari 4 yaitu pajak daerah, retribusi daerah, laba BUMD, dan lain-lain PAD yang syah. Secara lebih spesifik pengertian pajak daerah diatur dalam UU no.34 tahun 2000 tentang pajak dan retribusi daerah. Sedangkan kriteria teknik dan operasional pajak dan retribusi daerah yang dipungut oleh propinsi dan kabupaten/kota mengacu kepada PP no. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah dan PP no.66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan dana pemerintah daerah yang berasal dari aktivitas pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi daerah yang meliputi penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD, dan lain-lain hasil usaha yang syah.
- b. Pajak Daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dari masyarakat tanpa kontraprestasi secara langsung. Pajak daerah dapat dipaksakan pemungutannya secara hukum apabila wajib pajak mengelak atau tidak melaporkan pajaknya, sedangkan

- c. Retribusi Daerah merupakan penerimaan pemerintah daerah dimana si pembayar akan memperoleh kontraprestasi secara langsung dari Pemda Kota/Kabupaten. Retribusi merupakan

kejadian insidental yang sulit untuk diprediksikan penerimaannya setiap tahun.

Berdasarkan uraian diatas maka disusun hipotesis penelitian sebagai berikut :

- H_0 Besar penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
 H_1 Besar penerimaan pajak dan retribusi daerah signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian ini tidak memperhatikan perbedaan status disetiap kelompok wilayah kota/kabupaten di Jawa Timur.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengukur prosentasi kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD dan statistik inferensial untuk menguji hipotesis atas signifikansi perbedaan pajak dan retribusi terhadap PAD di wilayah Jawa Timur. Uji hipotesis berbasis statistik parametrik dengan metode *one way ANOVA* dgn tingkat signifikansi 5, digunakan untuk menguji variabel pajak dan retribusi daerah dengan jumlah kelompok populasinya lebih dari 3 kelompok. Langkah-langkah analisis data dilakukan sebagai berikut:

- Klasifikasi dan perhitungan data jumlah realisasi pajak dan retribusi daerah sampel selama 5 tahun (1998 - 2002).
- Melakukan perhitungan prosentase kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD setiap daerah sampel.
- Melakukan analisis statistik dengan *one-way ANOVA* untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di wilayah Jawa Timur.
- Melakukan interpretasi atas hasil pengolahan data.

Untuk melaksanakan langkah pengelompokan populasi dan analisis maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

Propinsi Jawa Timur terdiri dari 38 Kabupaten dan Kota daerah tingkat II. Sebelah Barat dibatasi oleh Propinsi Jawa Tengah dengan Kabupaten Ngawi, Tuban, dan Ponorogo sebagai perbatasan. Laut Jawa

menjadi garis batas propinsi di sebelah Utara dan Samudera Indonesia memberi batas bagian Selatan. Untuk wilayah Timur terdapat Selat Bali yang memisahkan antara Propinsi Jawa Timur dengan Bali. Propinsi Jawa Timur mempunyai kondisi geografis yang mirip dengan propinsi lain di Pulau Jawa, sehingga tidak terdapat hal yang istimewa sebagai keunggulan daerah.

Surabaya merupakan Ibukota propinsi sekaligus menjadi kota terbesar kedua setelah Jakarta, sebagai kota pemerintahan, pusat perdagangan, pusat industri, dan sekaligus pusat populasi yang menjadi magnitude mobilisasi penduduk kota-kota sekitarnya. Dukungan kota-kota satelit seperti Kabupaten Sidoarjo, Kota dan Kabupaten Mojokerto, Kota dan Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Bangkalan menjadi kota-kota penyangga yang potensial dan ikut berkembang sebagai pemasok kebutuhan hidup kota Surabaya. Posisi ini berakibat timbulnya berbagai perubahan sosial budaya dan mobilisasi penduduk yang berbeda. Arus sosial budaya dan gaya hidup merembet dari Surabaya ke kota-kota kecil sekitarnya, sementara arus mobilisasi penduduk sebaliknya. Keadaan ini menimbulkan berbagai bentuk sosial dan budaya yang akhirnya menjadi karakteristik khas setiap daerah di Jawa Timur.

Secara umum karakteristik masing-masing wilayah Propinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut : wilayah Barat merupakan wilayah pertanian yang tergolong subur. Wilayah ini dikenal sebagai daerah lumbung padi dengan lahan pertanian yang sangat luas.

Selain itu kedekatan dengan Propinsi Jawa Tengah dengan beberapa kota besarnya cukup berpengaruh terhadap perkembangan pertanian ini sebagai basis pemasaran. Hal ini berakibat perubahan sosial budaya juga cenderung lambat mengingat karakteristik daerah yang *rural* dan pertanian yang cenderung mempunyai budaya tertutup dan statis.

Berbeda dengan bagian Selatan yang secara geografis merupakan daerah pegunungan dan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia. Kondisi alam yang keras dan panas berdampak terhadap pembentukan karakter sosial budaya masyarakat. Selain itu jauhnya dengan kota besar menjadikan tingkat daya tahan masyarakat dan semangat berubah masyarakat menjadi dominan. Secara geografis dampak terhadap aktivitas sosial ekonomi juga berbeda yaitu berorientasi pada perikanan dan peternakan. Kabupaten Tulungagung, Kota dan Kabupaten Blitar, dan Kabupaten Lumajang terkenal sebagai daerah penghasil susu, daging, dan telur. Sedangkan Kabupaten Trenggalek dan Pacitan dikenal sebagai kabupaten yang mengutamakan sector perikanan.

Bagian Utara didominasi dataran rendah dan pesisir pantai. Karakteristik dinamis dan responsifitas masyarakat terhadap perubahan sosial budaya sangat cepat, mengingat sejak berabad-abad menjadi jalur perdagangan antara pulau dan bahkan dunia. Daerah perkembangannya banyak didukung oleh sektor perikanan dan perdagangan, mengingat kedekatannya dengan kota sentral Surabaya yang menjadi pusat populasi. Hal yang sama juga hampir mirip dengan bagian Timur, karena menjadi perbatasan antara Propinsi Bali yang merupakan propinsi pariwisata di Indonesia. Sektor perdagangan menjadi pendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk, karena berada pada jalur perdagangan antara pusat industri (Surabaya dan sekitarnya) dengan pusat pariwisata yang dikenal sebagai daerah konsumtif. Perubahan sosial dan budaya masyarakatnya tergolong dinamis dan terbuka terhadap pengaruh luar.

Wilayah tengah mempunyai karakteristik yang unik. Kondisi geografis didominasi oleh dataran tinggi di bagian Selatan serta dataran rendah di bagian Utara. Akulturasi budaya dan sosial antara budaya *rural* (pedesaan yang didorong oleh pertanian) dengan budaya *urban* (kota yang didorong oleh industri dan perdagangan) membentuk karakteristik mobilisasi

sosial budaya yang khas. Sektor jasa, industri, perdagangan, dan sedikit pertanian menjadi sektor andalan untuk mobilisasi ekonomi dan sosial masyarakat. Berbagai kota besar lain seperti Kota Mojokerto, Sidoarjo, Malang, dan Pasuruan menjadi pusat populasi yang akan menjadi tarikan berkembang ekonomi masyarakat.

Berdasarkan klasifikasi wilayah oleh PEMDA Propinsi Jawa Timur, maka agar diperoleh keadaan populasi yang relatif homogen sebagai dasar pengambilan sampel, area sampling yang digunakan berdasarkan pada pola tersebut. Pada tahap kedua, dikarenakan relatif homogen, maka metode pengambilan sampel menggunakan *random sampling* dimana setiap kabupaten mempunyai hak yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Metode ini sekaligus dapat mengurangi bias data sampel.

Tahapan metode penelitian diatas dimana pengambilan sampel menggunakan dua tahap, maka pada tahap kedua secara random dipilih sampel yang besarnya minimal 20% adalah sebagai berikut :

- a. Wilayah Utara dipilih Kabupaten Gresik, Sumenep, Bangkalan, dan Tuban,
- b. Wilayah Selatan dipilih Kabupaten Blitar, Tulungagung dan Lumajang,
- c. Wilayah Tengah dipilih Kota Malang, Surabaya, Kabupaten Mojokerto, Pasuruan dan Sidoarjo,
- d. Wilayah Barat dipilih Kabupaten Madiun, Ponorogo dan Nganjuk,
- e. Wilayah Timur dipilih Kabupaten Jember, Situbondo dan Probolinggo.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan pengelompokan data yang diperoleh maka dilakukan *content analysis* terhadap data dokumentasi Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (DJKPD) selama 5 tahun. Data tersebut kemudian diklasifikasikan dan dihitung prosentase kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD. Peneliti beranggapan bahwa data tersebut valid berasal dari daerah yang bersangkutan, sehingga tidak perlu melakukan konfirmasi kepada daerah yang dipilih menjadi sampel penelitian. Data tersebut disajikan pada lampiran 1 – 5 :

Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa baik secara tahunan maupun agregat kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD rata-rata diatas 75%

(Lampiran 1–5). Simpulan tersebut berdasarkan analisis tahunan terhadap kontribusi pajak dan retribusi daerah maupun analisis agregat. Hal ini berarti pajak dan retribusi daerah cukup dominan dan menjadi sumber penerimaan PAD yang sangat diandalkan oleh setiap daerah. Kondisi ini juga berarti pemerintah daerah tidak begitu peduli dan cenderung mengabaikan intensifikasi pos-pos penerimaan PAD yang lain sebagai sumber PAD.

Kebijakan yang ofensif terhadap pajak dan retribusi daerah oleh Pemda tingkat II cukup beralasan karena kedua pos ini merupakan sumber penerimaan PAD yang relative stabil dibandingkan pos lain. Namun demikian seperti dilansir oleh Machfud Sidig (Dirjen Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah) kebijakan yang over intensif dan ekstensif terhadap tarif dan basis pajak dan retribusi daerah dapat mengakibatkan distorsi ekonomi bahkan ekonomi negatif. Fungsi pajak dan retribusi daerah sebagai instrumen pemerataan dan pengendalian aktivitas ekonomi daerah justru dapat menjadi bomerang pada pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh LPEM FE-UI bekerjasama dengan *Clean Urban Project*, RTI tahun 2000 bahwa kontribusi PAD terhadap APBD rata-rata 25% di seluruh Indonesia, berarti secara silogisme dapat disimpulkan bahwa sumbangan pajak dan retribusi daerah terhadap APBD sangat kecil (dibawah 25%), akibatnya independensi daerah terhadap pusat dalam kerangka otonomi dalam perspektif keuangan bukan hanya sulit tetapi sangat tidak mungkin (*absurb*).

Selanjutnya dilakukan uji one way ANOVA dan hasilnya sebagai berikut :

Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Tahun 1998

Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel 1 :

Tabel 1. Analisis one way ANOVA terhadap kontribusi.

ANOVA					
DAERAH					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Group	17.028	11	1.548	.555	.812
Within Groups	16.750	6	2.792		
Total	33.778	17			

Berdasarkan hasil analisis *one way ANOVA* diperoleh nilai F hitung sebesar 0,555 dan *Probabilita Value (sig)* sebesar 0,812. Oleh karena uji analisis yang digunakan adalah sig (P-val) yaitu sebesar 0,812 jauh diatas 0,05 (á ditetapkan), maka Ho diterima. Berarti bahwa kontribusi (peranan) pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur tahun 1998 tidak berbeda secara signifikan. Dengan kata lain pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sama dominannya pada PAD di Jawa Timur.

Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 1999

Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2. Analisis one way ANOVA terhadap kontribusi.

ANOVA					
DAERAH					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Group	18.611	10	1.861	.859	.600
Within Groups	15.167	7	2.167		
Total	33.778	17			

Sumber : Data sekunder (diolah) 2004

Berdasarkan hasil analisis *one way ANOVA* diperoleh nilai F hitung sebesar 0,859 dan *Probabilita Value (sig)* sebesar 0,600. Berarti nilai sig (P-val) yaitu sebesar 0,600 jauh diatas 0,05 (á ditetapkan), sehingga Ho diterima. Dengan demikian kontribusi (peranan) pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur tahun 1999 tidak berbeda secara signifikan. Artinya pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sama dominannya pada PAD di Jawa Timur.

Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2000

Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 3. Analisis one way ANOVA terhadap kontribusi.

ANOVA

DAERAH

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	32.278	13	2.483	6.621	.041
Within Groups	1.500	4	.375		
Total	33.778	17			

Berdasarkan hasil analisis *one way ANOVA* diperoleh nilai F hitung sebesar 6,621 dan *Probabilita Value (sig)* sebesar 0,041. Berarti nilai sig (P-val) yaitu sebesar 0,041 dibawah 0,05 (á ditetapkan), sehingga Ho ditolak. Dengan demikian kontribusi (peranan) pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur tahun 2000 berbeda secara signifikan. Atau pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang berbeda pada PAD di Jawa Timur.

Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2001

Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. Analisis one way ANOVA terhadap kontribusi

ANOVA

DAERAH

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	28.778	15	1.919	.767	.699
Within Groups	5.000	2	2.500		
Total	33.778	17			

Sumber : Data sekunder (diolah) 2004

Berdasarkan hasil analisis *one way ANOVA* diperoleh nilai F hitung sebesar 0,767 dan *Probabilita Value (sig)* sebesar 0,699. Berarti nilai sig (P-val) yaitu sebesar 0,699 jauh diatas 0,05 (á ditetapkan), sehingga

Ho diterima. Dengan demikian kontribusi (peranan) pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur tahun 2001 tidak berbeda secara signifikan. Artinya pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sama dominannya pada PAD di Jawa Timur.

Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2002.

Hasil analisis tersebut disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Analisis one way ANOVA terhadap kontribusi.

ANOVA

DAERAH

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	16.111	9	1.790	.811	.622
Within Groups	17.667	8	2.208		
Total	33.778	17			

Sumber : Data sekunder (diolah) 2004

Berdasarkan hasil analisis *one way ANOVA* diperoleh nilai F hitung sebesar 0,811 dan *Probabilita Value (sig)* sebesar 0,622. Berarti nilai sig (P-val) yaitu sebesar 0,622 jauh diatas 0,05 (á ditetapkan), sehingga Ho diterima. Dengan demikian kontribusi (peranan) pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur tahun 2002 tidak berbeda secara signifikan. Artinya pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sama dominannya pada PAD di Jawa Timur.

3.6. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah secara Agregat (1998-2002)

Analisis secara agregat ini menggunakan model data panel dengan alat analisis statistik *one way ANOVA*. Penggunaan data panel ini disebabkan data tersebut merupakan data *time series* selama 5 tahun (1998 – 2002). Hasil analisis data dengan menggunakan data panel adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Analisis one way ANOVA terhadap kontribusi.

ANOVA					
WILAYAH					
	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Between Groups	72,182	37	1,951	1,020	,468
Within Groups	99,474	52	1,913		
Total	171,656	89			

Berdasarkan hasil analisis *one way ANOVA* diperoleh nilai F hitung sebesar 1,020 dan *Probabilita Value (sig)* sebesar 0,468. Berarti nilai sig (P-val) yaitu sebesar 0,468 jauh diatas 0,05 (á ditetapkan), sehingga H_0 diterima. Dengan demikian kontribusi (peranan) pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa Timur tidak berbeda secara signifikan. Atau pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan yang sama dominannya pada PAD di Jawa Timur.

Berdasarkan uraian diatas maka hasil secara umum dapat dijelaskan sebagai berikut : Analisis data per tahun menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan antara kelima wilayah di Jawa Timur. Nilai P-Val (*sig*) tahun 1998, 1999, 2001, dan 2002 jauh diatas 0,05 (á ditetapkan). Sementara hanya pada tahun 2000 saja yang menunjukkan perbedaan antara kelima wilayah tersebut. Hasil analisis selama 4 tahun tersebut menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan perbedaan kontribusi pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Sedangkan dari analisis secara agregat diperoleh nilai *sig* 0,468. Nilai ini jauh diatas nilai $\alpha = 0,05$ (á ditetapkan). Berarti tidak terdapat perbedaan kontribusi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten/ Kota di Jawa Timur. Analisis secara agregat ini sejalan dengan keempat analisis tahunan diatas, sehingga semakin memperkuat hasil penelitian bahwa memang tidak terjadi perbedaan diantara daerah sampel tersebut.

Apabila dikaitkan dengan rasio PAD terhadap APBD di Jawa Timur sebesar 29,72% (Simanjuntak, 2000) dimana pajak dan retribusi daerah cukup dominan (data diatas rata-rata ebih dari 75%), maka dapat ditarik kesimpulan secara silogisme bahwa pajak dan retribusi daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap APBD. Kedua pos tersebut

menjadi andalan penerimaan daerah Hal ini memperkuat hasil penelitian sebelumnya bahwa pajak dan retribusi daerah sangat dominan terhadap PAD, sementara PAD jauh dibawah kebutuhan APBD, tetapi dirasa perlu adanya kebijakan pemerintah pusat untuk mengkaji kembali system bagi hasil pajak dan UU tentang pajak dan retribusi daerah dalam rangka mengoptimalkan kedua pos tersebut sebagai pemicu kemandirian daerah.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

- Peranan pajak dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten/Kota di Jawa Timur cukup dominan dengan rata-rata prosentase diatas 60%.
- Peranan dan kontribusi tersebut tidak berbeda secara signifikan antara kelima wilayah di Jawa Timur. Artinya wilayah Utara, Selatan, Tengah, Barat, dan Timur (yang mempunyai karakteristik geografi, topografi, ekonomi, dan sosial yang berbeda) sama-sama mengandalkan pajak dan retribusi daerah sebagai sumber utama penerimaan PAD.
- Temuan diatas berarti memperkuat penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh LPEM-UI dan Departemen Keuangan.
- Temuan diatas semakin memperkuat keyakinan makin sulitnya daerah untuk mandiri dalam pembiayaan pembangunan tanpa perubahan kebijakan terhadap *tax system* yang ada di Indonesia.

Saran

- Dirasa perlu adanya kebijakan pemerintah pusat dalam sistem perpajakan dengan memberikan obyek-obyek pajak potensial kepada daerah atau dengan merubah porsi pola bagi hasil dimana daerah sebagai pengelola, sedangkan pusat sebagai penerima bagi hasil. Bukan seperti kebijakan saat ini, dimana pusat sebagai pengelola, sedangkan daerah sebagai penerima bagi hasil.
- Perlu adanya penelitian lanjutan tentang peranan PAD terhadap APBD di Jawa Timur untuk mendukung perubahan kebijakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, 2000, Proyek Pendataan Potensi Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Dati II Kediri, Laporan Penelitian dari Kerjasama LM FE Unibraw & BAPPEDA Kabupaten Dati II Kediri, Malang
- Anonim, UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- Anonim, UU No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
- Anonim, UU No. 34 tahun 2000 Tentang pajak dan Retribusi Daerah
- Anonim, PP No. 65 tahun 2001 Tentang pajak Daerah
- Anonim, PP No. 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah
- Bambang Permadi, 2000, Membangun Sektor Publik, Kelembagaan dan Infrastruktur, Makalah dalam Konggres Nasional ISEI, 21-23 April, Makassar.
- Munawar, Islamil, 2002, Pendapatan Asli Daerah dalam Otonomi Daerah, Jurnal TEMA, Vol III, No I, Universitas Brawijaya Malang.
- Simanjuntak, Robert A., 2000, Beberapa Alternatif Sumber Penerimaan Daerah dalam Rangka Pemberdayaan Pemerintah *Daerah*, Makalah dalam Konggres Nasional ISEI, 21-23 April, Makassar
- Brennan, Geoffrey dan Buchanan, "Tax Limits and The Logic of Constitutional Restriction, dalam "Democratic Choice and Taxation" A Theoretical and Empirical Analysis", Walter and Winer, Makalah seminar "*Decentralization in developing countries*", Jakarta, 2001.
- LPEM Universitas Indonesia bekerjasama dengan Clean Urban Project, RTI (2000), "Laporan Studi Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Keuangan Daerah di Indonesia", Jakarta.
- Republik Indonesia, "Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2001",.
- Ter-Minassian, Teresa (1999), "Fiscal Federalism in Theory and Practice", International Monetary Fund, Washington.
- Sidik, Machfud, Optimalisasi Peran Pajak dan Retribusi Daerah di Era Otonomi, makalah Seminar, Wisuda XXI STIA LAN Bandung, 2002.
- Kaho, Riwu, 1999, Peranan Pajak dan Retribusi Daerah dalam era otonomi daerah, publikasi penelitian, Internet.
- Asrol, 1999, Instrumen pajak dan retribusi daerah dalam era otonomi daerah" makalah seminar menyongsong otonomi daerah" Universitas muhammadiyah magelang, tidak dipublikasikan.